

**KENDALA INTEGRASI BANGSA MASA TRANSISI PERUBAHAN
PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN DAN SOLUSI
PENYELESAIANNYA**

Oleh : Drs. Joko Sri Sukardi¹

Pendahuluan

Negara-negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan, seperti halnya dengan bangsa Indonesia semenjak memproklamirkan diri sebagai bangsa merdeka, pada saat itulah bangsa Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang kehidupan, menyangkut pembangunan bidang politik, ekonomi, maupun sosial.

Sebagai negara yang sedang melaksanakan pembangunan berbagai perubahan sosial telah terjadi, baik sebagai pilihan kebijakan pemerintah maupun karena adanya reaksi dari masyarakat akibat penerapan kebijakan pemerintah pada saat rezim berkuasa. Tidak tertutup kemungkinan protes atau reaksi masyarakat begitu besar dan keras sehingga dapat menimbulkan terjadinya konflik antara masyarakat dan pemerintah. Dengan adanya pertentangan dan kesepakatan yang diputuskan pemerintah sesudahnya, akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah pada saat selanjutnya dalam menentukan pilihan-pilihan untuk periode pembangunan pada masa-masa selanjutnya.

Pemahaman pembangunan pada suatu periode tidak dapat dilepaskan dari pengaruh periode sebelumnya, sehingga untuk menemukan akar penyebabnya harus dicari pada periode pembangunan sebelumnya. Mengkaji pembangunan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks kesejarahan, sebab setiap periode waktu mempunyai dinamika sendiri-sendiri.

¹ Dosen Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan FIP_UNY

Merupakan kenyataan sejarah bahwa pembangunan di Indonesia masa Orde Baru, di mana pemerintah pusat sangat kuat atas pemerintah daerah sesudah tahun 1970, dikarenakan sumber-sumber keuangan menjadi semakin besar dalam membiayai dana-dana pembangunan. Sejalan dengan itu pemerintah pusat semakin mampu membuat daerah menjadi tunduk. Akibat selanjutnya adalah ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat semakin besar pula, sehingga menjauhkan daerah untuk berkembang secara mandiri dan otonom.

Sentralisasi pembangunan dibarengi dengan penggunaan struktur birokrasi yang ketat dan seragam, pada satu sisi hasilnya dapat mengintegrasikan daerah-daerah yang terpencar-pencar secara geografis dan beragam secara historis dan kultural, menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pada sisi lain sentralisasi yang amat berlebihan yang menuntut adanya penyeragaman di pelbagai aspek kehidupan dalam pembangunan, akan berimplikasi dapat mematikan partisipasi daerah untuk berkembang secara maksimal.

Demikian juga dalam memahami perubahan paradigma pembangunan sebelumnya yang bersifat sentralistik, menuju pada paradigma baru, melalui masa transisi di mana pola-pola lama sudah mulai ditinggalkan, sedangkan pola-pola baru belum terbentuk secara mapan, sehingga masyarakat mengalami kekosongan norma, menurut Emile Durkheim cenderung terjadinya anomie, karena masyarakat mengalami kebingungan karena kehilangan pegangan norma. Pertemuan dan perbenturan nilai antara nilai-nilai baru yang dibawa oleh pembangunan dengan nilai-nilai lama yang sudah mengakar dan meresap pada masyarakat sebelum periode pembangunan baru dilaksanakan.

Anomie masyarakat, pertemuan dan perbenturan nilai-nilai lama ke nilai-nilai baru, yang terjadi pada masa transisi perubahan paradigma, potensial menyebabkan konflik antara pemerintah dan masyarakat, sehingga potensial menimbulkan kerusuhan massa. Sedangkan konflik antar masyarakat, para ahli menyebutnya sebagai konflik horisontal, sehingga potensial menimbulkan konflik antar etnis.

Kesemuanya itu akan menjadi kendala mewujudkan integrasi bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, yang dibangun berdasarkan kemajemukan dan pluralitas tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama dan perbedaan status ekonomi sosial masyarakat, yang dirintis oleh pendiri bangsa, yang mencapai puncaknya dengan dicituskannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan mencapai klimaknya tanggal 17 Agustus 1945 dengan kemerdekaan negara Republik Indonesia.

Kondisi Penyebab Timbulnya Kerusuhan Massa dan Upaya Penyelesaiannya

Beberapa kondisi masyarakat yang potensial menyebabkan kerusuhan massa di berbagai wilayah Indonesia adalah : Pertama, menumpuknya keresahan dan ketidakpuasan masyarakat atas situasi sosial, ekonomi, politik yang mereka rasakan dalam keseharian hidupnya. Kedua, tersumbatnya aspirasi masyarakat dalam format pembangunan politik dan hukum. Ketiga, gejala kemiskinan dan tajamnya ketimpangan dalam struktur masyarakat bawah antara si kaya dan si miskin. Keempat, munculnya fenomena praktek-praktek kolusi, korupsi dan manipulasi yang intensitasnya makin tinggi, dan kelima ketimpangan distribusi aset ekonomi yang cenderung dirasakan oleh golongan kecil kelompok masyarakat (Masyarakat Indonesia: 1997. 106).

Menghubungkan kerusuhan massa di atas dengan kesenjangan ekonomi dan degradasi kultural yang dialami bangsa Indonesia seperti penurunan mentalitas, etika, moral dan nilai. Kondisi ini menjadi penyebab massa menjadi frustrasi sehingga massa mudah untuk berbuat beringas dan brutal. Kesenjangan sosial ekonomi dan frustrasi massal, bagaikan ibarat daun yang sudah kering sehingga menjadi peka dan sensitif untuk terbakar.

Sedangkan penjelasan tentang munculnya kerusuhan massa menurut Hagopian (1978 : 261), seringkali dihubungkan dengan " *the nature of man* " sifat

dasar manusia, yang menurut Hobbes sebagai "*homo sapien*" atau versi Le Bon, sebagai kecenderungan "*barbarianisme*" ketika terjadi kerumunan (*crowd*), atau menurut Durkheim disebutnya sebagai "*anomie*" suatu kondisi hilangnya orientasi masyarakat yang mempengaruhi gerakan massa, termasuk didalamnya kerusuhan massa. Gustave Le Bon menjabarkan lebih lanjut tentang kerumunan massa (*crowds*) akan berkembang menjadi kekerasan atau kerusuhan massa, disebabkan oleh kehilangan kesadaran massa ketika mereka melebur dan terlibat dalam kerumunan. Penularan kerumunan akan menghapus semua perbedaan budaya (*cultural*) dan pendidikan di antara anggota kerumunan. Sedangkan menurut Hoffer, dalam situasi di mana anggota-anggota kerumunan dikontrol oleh sikap ketidakpuasan, rasa kecewa dan lainnya. Sumber-sumber kekecewaan, rasa tidak puas, dianggap sebagai penyebab munculnya gerakan massa.

Smelser mengemukakan tentang gerakan massa ketika sudah berubah ke tingkat aksi, maka perlu diupayakan adaptasinya atau penyelesaiannya dengan dua cara yaitu : 1) dengan cara aksi represif melalui pendudukan lokasi gerakan dengan tekanan-tekanan dan 2) yaitu upaya memahami gerakan massa dari sifat dasarnya yaitu apa penyebabnya massa bergolak, juga bagaimana tanggapan pemerintah atas munculnya perilaku massa bergerak, dan mengetahui kunci sosialnya, guna menemukan akar permasalahannya.

Menemukan akar penyebab konflik dan berusaha untuk mengeliminir, tidak hanya dengan upacara yang sifatnya ritual semata dengan melakukan perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai, melainkan dengan usaha untuk menghilangkan sumber terjadinya berbagai keresahan dan ketidakpuasan masyarakat pada tataran masyarakat kalangan bawah (*grassroots*). Hal ini berarti harus ada upaya perbaikan di berbagai bidang kehidupan yang potensial sebagai penyebab terjadinya keresahan dan ketidakpuasan tersebut.

Terjadinya kerusuhan massa akan sangat merugikan masyarakat dan negara, baik dilihat dari segi materiil maupun yang non-materiil. Akibat selanjutnya akan

menyebabkan lemahnya fondasi sosial, ekonomi, hukum dan politik bangsa Indonesia dalam menghadapi era globalisasi. Apabila gejala ini terus berkelanjutan, akan merusak sendi-sendi persatuan kesatuan bangsa, yang membawa bangsa di ambang batas kehancuran, yaitu desintegrasi bangsa .

Kondisi Penyebab Terjadinya Kerusuhan antar Etnis dan Upaya Penyelesaiannya.

Indonesia sebagaimana kita ketahui memiliki keanekaragaman etnis dan kondisi sosio budayanya. Pluralisme mencakup kurang lebih 360 kelompok etnis yang memiliki kurang lebih 250 bahasa yang berbeda, agama dan struktur sosial, organisasi serta perbedaan letak geografis. Sementara menurut Furnivall (1976, 198) menjelaskan kemajemukan masyarakat ("*plural Society*") dengan ciri keragaman tata nilai yang dihayati dan dipahami oleh masyarakatnya, serta perbedaan kelompok etnis diyakini sebagai salah satu penyebab timbulnya konflik sosial dengan kecenderungan, meskipun mereka hidup berdekatan, realitasnya mereka tidak terintegrasi dalam kehidupan politik bersama.

Struktur sosial yang berbeda atas dasar etnis, maka jika etnis itu tidak terbuka dan tidak memiliki ciri untuk membaur (asimilasi) maka akan menimbulkan ketegangan sosial. Dominasi salah satu kultur dalam struktur sosial dianggap sebagai bibit awal munculnya konflik sosial kecenderungannya ke arah gerakan sosial. Bibit ini secara langsung dapat mempengaruhi struktur ketegangan, sebenarnya struktur ketegangan yang dipengaruhi perubahan jangka pendek seperti konflik, dan ketidaksesuaian yang menurut Emile Durkheim akan menghilangkan orientasi masyarakat menjadi anomie.

Sementara itu nilai pembangunan memiliki kemajemukan sifat, akan tetapi satu kepentingan. Secara konsepsional pembangunan tidak mengenal konsep etnis, golongan atau kelompok. Pada pihak lain kalangan masyarakat lokal mengharap

adanya prioritas untuk lebih mementingkan kelompok lokal di banding kelompok pendatang.

Pertarungan nilai lokal dalam pergeseran sosial, kian membesar tatkala terjadi penyimpangan ideologi pembangunan yang dianggap pada awalnya sebagai satu-satunya jalan mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan. Realitas sosial yang dipahami masyarakat lokal, justru menunjukkan ciri lain. Munculnya kelas baru pengontrol ekonomi lokal. Sementara sebagian masyarakat lokal kian terpinggirkan, tersubordinasikan secara ekonomi maupun politik.

Kesenjangan ekonomi seperti di atas memang tidak secara langsung memicu kerusuhan massa, tetapi ia telah menanamkan benih cemburu dan dendam dari golongan pribumi dan penduduk lokal yang ditelantarkan pihak-pihak lain yang kebetulan diuntungkan. Selanjutnya akan membentuk stereotip negatif terhadap golongan tertentu tersebut. Di sini cemburu dan dendam tidak bersifat pribadi, tetapi struktural, oleh karena itu ledakannya juga bersifat struktural. Perusuh tidak menyerang musuhnya karena alasan pribadi, akan tetapi menggeneralisasikan orang ke dalam kelompok atau golongan, yang menggambarkan ciri-ciri golongannya. Lalu mengapa sasaran huru hara, atau konflik antar etnis adalah "orang pendatang" dan "golongan pendatang" teori "*agresi-frustrasi*" dapat menerangkannya.

Konflik-konflik yang mengawali kerusuhan massal menurut Coser (1964 : 49), bukanlah *realistic conflicts*, tetapi *non-realistic conflicts*, di mana tidak begitu penting konflik antara etnis pendatang dan etnis lokal, atau antara pribumi dan non pribumi, karena selama ini sudah biasa hidup damai dalam kehidupan antara mereka. Jika terjadi *realistic conflicts* antara dua individu yang berlainan suku-bangsa, ras dan agama, konflik ini tidak perlu diikuti oleh agresifitas dan kebencian, tidak perlu diikuti nafsu untuk mengakhiri konflik dengan cara mengebiri pihak yang lain, tujuan sesungguhnya bukanlah untuk menyelesaikan konflik melalui pembasmian etnik. Semua pihak sadar akan hal ini. Karena konflik tersebut adalah *non-realistic conflicts*.

Dalam *non-realistic conflicts* menurut Coser adalah untuk melepas ketegangan (frustrasi) yang terjadi karena hal lain. Di mana faktor penyebab dasarnya terlalu kuat dan keras untuk dihadapi. Orang akan cenderung mengarahkan agresinya kepada obyek pengganti yang lebih lemah, seperti halnya kita melihat anak-anak sekolah melepaskan akumulasi kekesalannya, kekecewaannya dan frustrasi mereka dengan cara melempar atau memukuli kelompok sekolah yang lainnya.

Pada akhirnya kerusuhan massa dapat dilihat dari sisi negatif, yang dapat menjadi ancaman terhadap integrasi bangsa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada sisi lain dapat dilihat secara positif, sebagai suatu proses sosialisasi pembentukan bangsa Indonesia dengan segala ke-bhineka-annya. Oleh karena itu perlu reaktualisasi dalam merefleksikan perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju cita-cita mewujudkan tujuan nasional, masih ada sebagian besar masyarakat yang masih jauh tertinggal, sedangkan sebagian kecil masyarakat menguasai dan mengenyam sumber-sumber kesejahteraan hasil pembangunan.

Penutup.

Untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, agar bangsa Indonesia terintegrasi dalam kemajemukan dan pluralitas, tanpa memandang perbedaan ras, suku dan agama maupun status sosial ekonomi, perlunya merefleksikan dan reaktualisasi kembali azas kekeluargaan, baik dalam melaksanakan maupun mendistribusikan hasil-hasil pembangunan, pertanyaannya adalah apakah kita masih tetap taat azas tersebut.

Untuk itu dalam mendapatkan dan memperebutkan hasil-hasil pembangunan, seharusnya dapat dimainkan dalam suatu permainan yang adil dan jujur dalam bentuk kompetisi. Karena kompetisi merupakan sarana seleksi untuk memperoleh warga bangsa yang berkualitas. Selain itu kompetisi merupakan bentuk konflik lunak. Konflik menurut Amstutz, adalah jiwa masyarakat yang kuat dan dinamis, tanpa

tension, pergulatan, perdebatan, dan sebagainya, bangsa Indonesia tidak mungkin menjadi bangsa yang kreatif dan produktif (1982 : 6). Apabila konflik punya potensi positif, maka yang diperlukan adalah bagaimana pemerintah bisa mengelola dan menjalankan manajemen konflik secara profesional, dengan menyiapkan kelembagaan dan menjaga ketaatan warga negara terhadap keteraturan, sehingga setiap perbedaan diselesaikan pada tataran kelembagaan yang sudah diciptakan dan disiapkan pemerintah, bukan diselesaikan menggunakan kekuatan fisik dan pengerahan massa. Dengan demikian kedewasaan dan kematangan dapat dimulai dari tataran atas (*elite*), tetapi juga harus dibarengi dan dimulai dari tataran bawah (*grassroots*).

Daftar Pustaka

- Amstutz, MR. (1982) *An Introduction to Political Science : The Management of Conflict* Glenview. Scott, Foremen and Co.
- Amri Marzali. (1997). *Tekanan Penduduk , Kompetisi atas Sumber Daya Dan Kerusuhan Massal*. Masyarakat Indonesia.
- Budiman. A. (1997). " *Kesenjangan Ekonomi dan Kerusuhan Sosial*" *Kompas*, 10 Maret.
- Coser, I. (1964). *The Function of Conflict*. New York. The Free Press.
- Durkheim, Emile. (1990). *Le Suicide*. Quardrige Presses Univeritaire de France. 5 edition. Paris.
- Ekhar Nusa Bakti & Moch Nurhasim. (1997). *Kekerasan Massa : Hipotesis dan Analisis Isi*. Masyarakat Indonesia.
- Furnivall, JF. (1980). *Prural Society*, dalam Hans Dieter Evers (ed) *Sociology of Sauthest Asia Readings on Social Change and Development*. Oxford University Press.
- Hagopian, Mark N. (1978). *Regime. Movements, and Ideology : A Comparative Introction to Political Science*, (New York and London Logman)
- Hoffer, Eric. (1958) *The True Believer*, New York: Mentor Books.
- Smelser. Neil J. (1962). *Theori of Colective Movements*. New York : Free Press.